

## Menapaki Jejak-Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah

Imama Zuhroh

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucewara Jl. Terusan Candi Kalasan, Blimbing, Malang  
Email korespondensi: [zuchroh1974@gmail.com](mailto:zuchroh1974@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to analyze the success of policies in the Umayyad era. The research method in this study is qualitative, while the analysis method in this study uses descriptive qualitative analysis, namely by examining sources related to policies in the Umayyad era. The results of these various literature studies were used to identify successes, especially economic sector policies in the Umayyad era. The result or finding in this study is that the success of the policy in the era of the Umayyads was a policy to focus on internal (not expanding the area of power), egalitarian, guarding the property of the people, efficiency of time and energy, speed of handling affairs, simplification of bureaucracy, selection of judges, regional heads, and officials, and persuasive dialogue with the rebels wisely. But here we will capture success, especially in the economic realm.*

**Keywords:** Bani Umayyads, Economic Policy, Caliph

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan dari kebijakan pada era bani Umayyah. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan menelaah sumber terkait kebijakan-kebijakan di era bani Umayyah. Hasil dari berbagai telaah literatur ini digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan khususnya kebijakan sektor ekonomi pada era bani Umayyah. Hasil atau temuan dalam penelitian ini adalah bahwa keberhasilan kebijakan di era bani Umayyah adalah kebijakan untuk fokus pada internal (tidak memperluas daerah kekuasaan), egaliter, penjagaan harta umat, efisiensi waktu dan tenaga, kecepatan penanganan urusan, penyederhanaan birokrasi, penyeleksian hakim, kepala daerah, dan pejabat, dan dialog persuasif dengan para pemberontak secara bijaksana. Namun disini kita akan memotret keberhasilan khususnya pada ranah ekonomi.*

**Kata kunci:** Bani Umayyah, Kebijakan Ekonomi, Khalifah

**Saran sitasi:** Zuhroh, I. (2023). Menapaki Jejak-Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1329-1334. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7582>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7582>

### 1. PENDAHULUAN

Peradaban hebat baik di Timur maupun di Barat dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain pernah dibidani oleh Islam (Batubara 2017). Di Timur misalnya, berdiri dengan gagah dinasti Abbasiyah berpusat di Baghdad, Irak dengan Bait al-Hikmah sebagai kawah candradimuka intelektual-intelektua terkemuka menghasilkan berbagai karya yang menginspirasi dunia menjadi representasi dari peradaban besar di Timur. Di Barat berdiri dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol dengan Universitas Cordova dan Universitas al-Hambra Granada sebagai pusat ilmu

pengetahuan yang menjadi rujukan Eropa mengenal dunia (Fathonah and harefa 2022).

Berbagai ilmuwan-ilmuwan hebat lahir dari sana seperti al-Ghazali, al-Farabi, Ibn Sina, Al-Mawardi, Ibn Misakwaih, Ibn Barjjah, Ibn Thufail, dan Ibn Rusyd (Fitmawati 2019). Selain itu, reformasi ekonomi yang mereka lakukan berhasil menyulap munculnya pusat-pusat ekonomi baru yang sangat diperhitungkan pada masa itu. Oleh karena itu, artikel ini akan melihat lebih jauh perekonomian pada masa Dinasti Umayyah di Andalusia dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan para khalifah serta kemajuan dan kemunduran yang terjadi. Dengan harapan dapat menjadi pelajaran berharga dan bahan

evaluasi serta renungan bersama dalam memformat dan merekonstruksi pemikiran dan pengembangan ekonomi Islam ke depan.

Bani Umayyah merupakan pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah 3

**Tabel 1. Daftar Khalifah Pada Masa Bani Umayyah**

No	Khalifah	Masa Pemerintahan
1.	Muawiyah bin Abi Sofyan	41-60 H/661-680 M
2.	Yazid bin Muawiyah	60-64 H/680-683 M
3.	Muawiyah bin Yazid	64-64H/683-683 M
4.	Marwan bin Hakam	64-65 H/683-685 M
5.	Abdul Malik bin Marwan	65-86 H/685-705 M
6.	Al-Walid bin Abdul Malik	86-96 H/705-715 M
7.	Sulaiman bin Abdul Malik	96-99 H/715-716 M
8.	Umar bin Abdul Aziz	99-101 H/716-720 M
9.	Yazid bin Abdul Malik	101-105 H/720-724 M
10.	Hisyam bin Abdul Malik	105-125 H/ 724-743 M
11.	Walid bin Yazid	125-126 H/743-744 M
12.	Yazid bin Walid	126-127 H/744-744 M
13.	Ibrahim bin Walid	127-127 H/ 744-745 M
14.	Marwan bin Muhammad	127-132 H/745-750 M

Sumber: *Sejarah Sistem Perekonomian Dinasti Umayyah (Rahayu and Kurniawan 2022)*

Dari seluruh khalifah tiga diantaranya yang memiliki peran penting dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian negara yaitu Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz. Dalam masa pemerintahan daulah Umayyah yang dipimpin oleh mereka mengalami kemajuan perekonomian yang sangat banyak (Fahrezy and Hamid 2021).

Peran baitul mal yang ada saat itu banyak sekali baitul mal yang cukup berperan, karena pada masa kepemimpinan mereka banyak sekali penaklukan yang dilakukannya. Dari arah barat penaklukan dimulai dari afrika utara sampai dengan Andalusia, kemudian dari arah timur yaitu dimulai dari India sampai dengan perbatasan cina. Negara negara yang ditaklukan tersebut memiliki kekayaan yang cukup melimpah. Sehingga setelah penaklukan tersebut negara mendapatkan harta dari *Kharaj* (pajak tanah),

dengan masa jabatan dari tahun 661 M-750 M atau berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Selama berdirinya daulah Umayyah, terdapat 14 khalifah, Berikut daftar lengkap seluruh khilafah pada masa Bani Umayyah:

*Jizyah* (pajak keamanan), zakat, *fai* (harta dari harta musuh) dan lainnya (Aravik and Tohir 2020).

Selain kontribusi Mu'awiyah bin Abi Sofyan diatas, pada masa pemerintahannya beliau juga mendirikan kantor cabang negara dan seluruh fasilitas lainnya seperti mencetak uang dan menetapkan jabatan baru untuk para hakim (Qadi). Para hakim pada waktu itu sudah boleh memutuskan perkara tanpa melibatkan peraturan politik yang ada, sehingga putusan hakim tersebut bisa diambil secara adil tanpa memandang siapapun yang sedang dihakimi (Arrumdani, Asari, and Yasmin 2022).

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini metode yang dipakai yakni deskriptif kualitatif yaitu berusaha untuk memahami berbagai konsep yang diperoleh dalam proses penelitian dengan menggunakan riset kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel, dan buku referensi yang mencakup topik berkaitan dengan tema penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

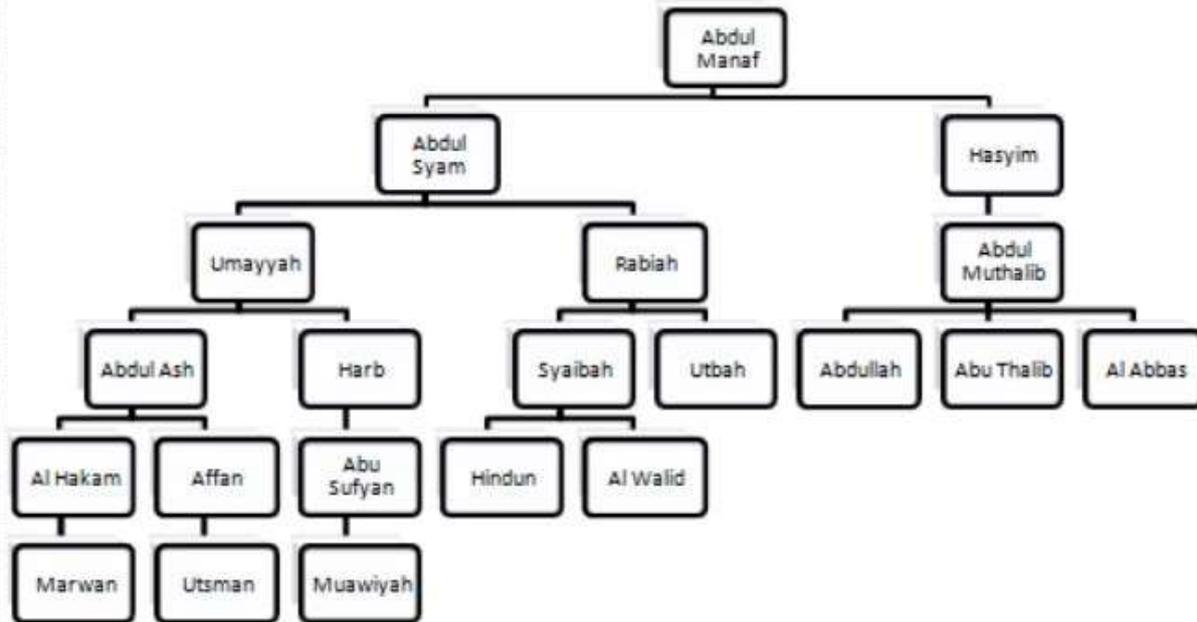
Jika menelusuri secara singkat berdirinya Bani Umayyah dimulai dari masa Abu Bakar sampai kepada Ali dinamakan periode Khilafah Rasyidah. Para Khalifahnya disebut al-Khulafa al-Rasyidun, (Khalifah-Khalifah yang mendapat petunjuk). Ciri masa ini adalah para Khalifah yang betul-betul teladan menurut nabi. Mereka dipilih melalui proses baiat, yang dalam istilah sekarang disebut demokratis. Setelah periode ini, kekuasaan diwariskan secara turun temurun, akan tetapi mereka tetap menjadikan baiat sebagai legalitas kepemimpinan seorang Khalifah. Selain itu, seorang Khalifah pada masa Khilafah Rasyidah, tidak pernah bertindak sendiri ketika negara menghadapi kesulitan (Permana 2017).

Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lain. Sedangkan, Khalifah-Khalifah sesudahnya sering bertindak otoriter. Semasa Ali bin Abi Thalib (656 M – 661 M), umat Islam dilanda badai fitnah akibat terbunuhnya Utsman Ibn Affan. Gelombang perpecahan dan pengkhianatan mewarnai

dunia politik masa itu, hingga ke Khalifahan jatuh ke tangan Muawiyah. Bani Umayyah adalah salah satu dari keluarga suku Quraisy, keturunan Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Silsilah Bani Umayyah merupakan keturunan Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusai seorang ketua atau pemuka Quraisy yang terkemuka. Secara geneologis (garis keturunan) Muawiyah bin Abi Sofyan bertemu

dengan silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf. Keluarga Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sebutan Bani Hasyim, sedangkan keluarga Umayyah disebut dengan Bani Umayyah. Berikut ini adalah silsilah Bani Umayyah, yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara Keluarga Bani Umayyah dengan Bani Hasyim (keluarga Nabi Muhammad SAW.) (Batubara 2017).

**Gambar 1. Silsilah Bani Umayyah**



Sumber: Reformasi Sistem Pemerintahan Masa Bani Umayyah (Frastuti 2020)

Daulah umayyah berdiri pada tahun 661 M yang didirikan oleh Mu'awiyah bin Abi Sofyan. Beliau menjadi khalifah setelah masa kepemimpinan Hassan bin Ali bin Abu Thalib. Pada waktu itu dikenal sebagai tahun 'amul jama'ah atau tahun persatuan, karena pada tahun tersebut Hasan berdamai kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Mu'awiyah setelah sebelumnya Hasan di baiat oleh sebagian umat Islam setelah kewafatan ayahnya. Tetapi Hasan menyadari kelemahannya dan kekurangannya sebagai pemimpin, sehingga beliau menyerahkan pemerintahannya kepada Mu'awiyah (Rohmah 2021).

Dalam sejarah pemerintahan daulah umayyah terbagi menjadi dua periode, yaitu periode pertama yang didirikan oleh Mu'awiyah bin Abi Sofyan yang ada di Damaskus. Pemerintahan ini berlangsung sekitar satu abad dan berhasil merubah sistem pemerintahan dari sistem khalifah pada mamlakat (kerajaan). Sedangkan fase kedua yaitu di wilayah Andalusia yang pada waktu itu pertama kali dipimpin oleh seorang gubernur yaitu Walid bin Abi Malik. Tak lama kemudian pemerintahan tersebut diubah menjadi

kerajaan terpisah dari daulah abbasiyah setelah penaklukan daulah Umayyah di Damaskus (Affan 2018).

Pada awal masa kepemimpinan Mu'awiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah. Ia berhasil merubah sistem pemerintahan Islam yang awalnya bersifat demokrasi menjadi monarki (kerajaan). Dalam sistem kepemimpinan tersebut mencapai kesuksesan dan akhirnya membuat kepemimpinan dilakukan secara turun temurun. Hal ini dimulai ketika Mu'awiyah menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk memilih Yazid sebagai pemimpin. Kemudian ia menjadikan sistem nepotisme sebagai sistem pengangkatan untuk pemilihan khalifah yang selanjutnya (Aravik and Tohir 2020).

Dari kejadian tersebut Mu'awiyah bertujuan untuk menirukan monarki (kerajaan) di Persia dan Bizantium yang dimana mereka menerapkan kepemimpinan berdasarkan garis keturunan. Perintah ini tentu saja menjadi awal pemerintahan kepada Yazid yang merupakan bentuk pengukuhan terhadap sistem pemerintahan yang Mu'awiyah akan lakukan. Pada saat itu tidak ada lagi kepemimpinan yang

berdasarkan asas kemusyawarahan dalam menentukan pemimpin yang baru. Sehingga orang-orang yang berada diluar garis keturunan keluarga secara otomatis tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin pemerintahan umat Islam.

Meskipun begitu, ia mempunyai alasan khusus melakukannya. Mu'awiyah berpikir karena belum stabilnya situasi politik setelah pergeseran pemerintahan yang sebelumnya. Walaupun turbulensi sosial politik yang ada, ia tetap mampu melakukan kebijakan-kebijakan progresif dan sukses mengembangkan perekonomian umat Islam pada waktu itu. Pembangunan dan penataan masyarakat muslim juga sangat tertata dengan baik. Terbukti ketika Mu'awiyah mencoba untuk menggabungkan beberapa wilayah hingga menjadi satu propinsi. Lalu kemudian dari setiap propinsi tersebut dipilih seorang gubernur (amir). Yang mana para amir tersebut bertugas untuk bertanggungjawab langsung kepada pemimpin. Dan para gubernur tersebut memiliki konsekuensi yang berfungsi sebagai khalifah di setiap daerah yang dipimpinnya. Hal ini dilakukan untuk mensentralisasikan wilayah kekuasaan dalam menopang jalannya pemerintahan, baik dari segi ekonomi, keamanan ataupun pertahanan.

Ketika kepemimpinan Hisyam Abdul Malik, gubernur mempunyai wewenang penuh dalam hal administrasi, politik dan militer . tetapi dalam hal penghasilan daerah langsung ditangani oleh pejabat khusus yang mempunyai tanggungjawab langsung kepada pemimpin pada waktu itu. Baitul Mal yang dalam pemerintahan tersebut sebelumnya digunakan sebagai dana swadaya masyarakat untuk kepentingan pembangunan atau rakyat, tetapi pada masa Mu'awiyah berubah fungsi sebagai harta untuk keluarga negara. Pada waktu itu rakyat hanya diwajibkan untuk menyetor pajak tanpa punya hak penggunaannya dan kemudian akan menjadi harta pribadi para pemimpin. Namun pada masa kepemimpinannya Umar Bin Abdul Aziz beliau tidak mengambil bagian dari baitul mal tersebut (Frastuti 2020).

Mu'awiyah memulia perannya dengan mendirikan kantor catatan negara dan merancang pengiriman surat melalui pos (al-barid) pada waktu itu dan seluruh fasilitas lain yang berkaitan. Dalam hal ini Mu'awiyah merupakan orang pertama di dalam islam yang menjadi pendiri departemen pencatatan (diwanul kahatam). Lembaga ini mempunyai peran yang sangat penting yang berkaitan dengan catatan keuangan

negara. Lembaga ini berlangsung sampai kepemimpinan ke-5 yaitu Abdul Malik bin Marwan, dimana pada waktu itu ia membuat peraturan baru yaitu pemerintahan harus mahir berbahasa Arab atau disebut sebagai gerakan arabisasi. Kemudian terbentuk pula lembaga Diwan Al-Barid yang bergerak di bidang komunikasi pada bidang ekonomi. Dari lembaga tersebut terjadilah pertukaran informasi yang berlangsung efektif dan efisien.

Setiap ketetapan yang baru dibuat sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemimpin harus disalin di dalam satu register, kemudian dokumen yang asli harus disegel dan dikirimkan ke alamat yang hendak dituju. Suatu saat ada sebuah kejadian dimana khalifah memberikan 1000 dirham kepada bendahara dari setiap provinsi, kemudian surat yang mereka bawa yang berisikan perintah itu dicegat di jalan, dan jumlahnya ditambah. Pelayanan pos atau disebut al-barid sudah dijalankan sejak masa pemerintahan mu'awiyah. Sedangkan barid atau kepala pos bertugas untuk memberikan informasi atau seluruh laporan yang terjadi di dalam pemerintahan provinsi. Dengan ini mu'awiyah membentuk dua secretariat umum yang menerapkan media dengan berbahasa arab, sedangkan untuk secretariat satunya berpusat di pemerintahan provinsi dengan menggunakan media berbahasa Yunani dan Bahasa Persia (Nisaa' 2022).

Adapun sistem lain yang dibangun Mu'awiyah pada masa kepemimpinannya adalah membentuk lima macam kepaniteraan atau pejabat. Kepaniteraan tersebut merupakan kepaniteraan dalam urusan korendensi atau surat menyurat, kepaniteraan dalam urusan perpajakan, kepaniteraan dalam urusan kepolisian, kepaniteraan dalam urusan militer atau persenjataan, dan yang terakhir kepaniteraan dalam urusan pengadilan. Setiap kepaniteraan diatas mempunyai masing-masing pemimpin yang disebut sebagai panitera. Pada masa itu khalifah Mu'awiyah menetapkan kebijakan pajak hanya dengan membayar sebesar 2,5 % dari setiap penghasilan umat muslim pada waktu itu. Akan tetapi, untuk memungut pajak dari setiap provinsi mu'awiyah mengutus seorang pejabat khusus yang diberi gelar *sebagai sahibul-kharaj*. Pejabat ini tidak terikat dengan gubernur atau pejabat lainnya, namun dia langsung dipilih oleh khalifah pada waktu itu. Artinya, gubernur harus menggantungkan dirinya terhadap *sahibul-kharaj* dalam masalah keuangan negara (Permana 2018).

Dalam pertahanan negara, Mu'awiyah mengembangkan militernya demi memperkuat

keperintahan dan mempunyai fungsi sebagai daerah futukhat jajahan. Guna untuk mendukung kebijakannya tersebut, mu'awiyah bahkan mewajibkan dari setiap rakyatnya untuk menjalankan wajib militer. Tidak hanya itu, mu'awiyah juga termasuk pemimpin yang mencoba perekonomian melalui jalur maritime. Pada saat mu'awiyah berkuasa, pasukan kaum muslim berhasil merebut dan menguasai galangan kapal di Akka atau Acre. Dimana, galangan kapal tersebut adalah galangan terbesar dan terlengkap di mesir. Awalnya kapal tersebut digunakan hanya untuk mengangkut pasukan tentara islam, akan tetapi berhubung wilayah jangkauan yg luas pada waktu itu sekitar dari india dan china sehingga secara perlahan membuka kesempatan yang sangat besar pada jalur perniagaan antar negara maupun perniagaan dalam lingkup internasional atau mendunia. Kapal tersebut menjadi kebutuhan penting dalam kegiatan ekonomi maritime lainnya.

Banyak kebijakan yang telah mu'awiyah lakukan pada masa ke-khalifahannya. Selain itu mu'awiyah juga mampu membangun struktur masyarakat yang penuh keharmonisan dan ketertiban serta tertata rapi. Salah satu contohnya adalah kerukunan hidup beragama yang sangat tinggi sehingga beliau bahkan mengutus dan mengangkat beberapa pejabat kerajaan yang beragama Kristen, dimana hal seperti ini belum pernah dilakukn oleh khalifah sebelumnya ataupun pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Adanya kerukunan ini akan sangat membantu perkembangan negara dan perekonomiannya dengan lebih mudah, karena struktur yang dibangun lebih rapi dan tertata. Mu'awiyah meninggal dunia pada tahun 680 M bertepatan pada april. Secara keseluruhan ia memerintah daulah umayah selama kurang lebih 20 tahun. Pada masa kepemimpinannya banyak sekali yang dicapai dan bisa dikatakan sebagai salah satu kemamkmuran daulah umayyah dari beberapa khalifah yang ada(Puspitasari, Yuliharti, and Yanti 2021).

Pencapaian bidang ekonomi lainnya terjadi pada masa pemerintahan daulah Umayyah yang di pimpin oleh Abdul Malik bin Marwan juga sangat berperan pada waktu itu. Pada waktu itu beliau menerbitkan mata uang dan membangun pabrik sendiri yang terbuat dari emas dan perak sebagai alat tukar yang sah(Hayani and Bakhtiar 2020). Pada masa tersebut banyak orang kafir yang ingin masuk Islam, karena beliau pada waktu itu hanya mewajibkan rakyatnya untuk membayar zakat tanpa membayar pajak lainnya.

Pada masa Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai masa kejayaan Daulah Umayyah. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil. Sifat beliau juga dimiripkan dengan keempat khalifah lainnya. Beliau memulai dan mempraktikan keadilan tersebut dari lingkup yang paling kecil ke yang paling besar. Yaitu dimulai dari dirinya sendiri, keluarga, kemudian rakyat-rakyatnya. Pada masanya beliau merombak kembali peraturan dan ketetapan negara sesuai dengan syariat islam. Selain itu ia juga banyak melakukan pembangunan dalam bidang infrastruktur dan sumber daya manusia.

Maka jika kita ingin mengamati bagaimana kemajuan ekonomi Islam dimulai perlu kiranya kita menapaki jejak-jejak perkembangan pada masa Bani Umayyah sebab pada masa tersebut meningkatnya anggaran pemerintah untuk berbagai pekerjaan umum meningkat tajam. Diantaranya adalah pembangunan prasarana dan mesjid-mesjid di berbagai provinsi, dan yang terbesar ialah pembangunan Doom of the Rock (Qubba al-Sahra) di atas mesjid Al Aqsa di Jerussalem. Sistem ekonomi yang bersandar pada hukum Islam diyakini pada banyak literatur sebagai sebuah sistem ekonomi masa depan(Zuchroh 2022).

#### **4. KESIMPULAN**

Demikianlah pembahasan secara singkat beberapa jejak kemajuan pada bidang ekonomi pada masa Bani Umayyah. Tentu dari sudut pandang yang berbeda tampak wajah khalifah yang terjadi berbeda atau bahkan menyimpang dari dogma kekhilafahan yang dipraktekan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Namun dengan penelitian yang bersifat objektif, maka akan tampak pada masa pemerintahan bani Umayyah banyak terjadi berbagai kemajuan gemilang yang telah mereka persembahkan pada Islam yang sampai saat ini pun masih dapat kita rasakan.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Affan, Muhammad. 2018. "Peperangan Proxy, Mozarab, Dan Cordova Dalam Sejarah Umayyah II Di Andalusia." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 2(1):36.
- Aravik, Havis, and Ahmad Tohir. 2020. "PEREKONOMIAN PADA MASA DINASTI Umayyah DI ANDALUSIA; SEJARAH DAN PEMIKIRAN." *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1(1):81-98.

- Arrumdani, Ning, Hasan Asari, and Nabila Yasmin. 2022. "KONTRIBUSI KOIN UMAYYAH TEMUAN SITUS BONGAL TERHADAP HISTORIOGRAFI ISLAM DI SUMATERA UTARA." *Yupa: Historical Studies Journal* 6(2):125–48.
- Batubara, Hamdan. 2017. "HUKUM ISLAM DI ANDALUSIA ; Studi Sejarah Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Bani Nasr (1232-1492 M)." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 2(2):125.
- Fahrezy, Alfin Falah, and Rizal Al Hamid. 2021. "PEMIKIRAN POLITIK NICCOLO MACHIAVELLI: STUDI KASUS DINASTI UMAYYAH." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4(2).
- Fathonah, Siti Aisyah, and Primoadin harefa. 2022. "Implementasi Kebijakan Ekonomi Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab RA."
- Fitmawati, Fitmawati. 2019. "MANAJEMEN BAITUL MAL PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATHAB R.A: SEBUAH TINJAUAN SEJARAH." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 19(1):1.
- Frastuti, Melia. 2020. "REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PENAKHLUKKAN DI DARAT DAN DILAUTAN PADA ERA BANI UMAYYAH." *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6(2):119–27.
- Hayani, Surma, and Nurhasanah Bakhtiar. 2020. "Arabisasi Pemerintahan Islam Pada Masa Khalifah Abdul Malik Bin Marwan." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3(2):204.
- Nisaa', Intan Hafidhatun. 2022. "HISTORY PERADABAN ISLAM PADA MASA DAULAH UMAYYAH." *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1(2):237–49.
- Permana, Farid. 2018. "PENDIDIKAN ISLAM DAN PENGAJARAN BAHASA ARAB PADA MASA DINASTI UMAYYAH." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 47.
- Permana, Luthfi Romdhon Andri. 2017. "DISTORSI SEJARAH ISLAM PADA MASA AL-KHULAFĀ AR-RĀSYIDŪN DAN DAULAH UMAYYAH (Tinjauan Kritis Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah)." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 17(2):59–71.
- Puspitasari, Yussi Mutia, Yuliharti Yuliharti, and Yanti Yanti. 2021. "Pemikiran Pendidikan Islam Pada Masa Umayyah." *Kutubkhanah* 20(2):152.
- Rahayu, Muhammad Azhar, and Rachmad Risqy Kurniawan. 2022. "Sejarah Sistem Perekonomian Islam Pada Masa Pemerintahan Daulah Umayyah Di Andalusia Dan Daulah Abbasiyah."
- Rohmah, Roisah Fathiyatur. 2021. "PENGARUH PEMERINTAHAN TERHADAP KRITIK SASTRA ARAB MASA UMAYYAH DAN ABBASIYAH." *A Jamiy : Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 10(2):271.
- Zuchroh, Imama. 2022. "Menyelami Keuangan Islam: Tradisi Dan Legacy." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(1):37. doi: 10.21043/tawazun.v5i1.13389.